

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aburaera, Sukarno, 2017, *Filsafat Hukum (Teori dan Praktik) Cetakan Ke-5*, Kencana, Jakarta.
- Adi, Rianto, 2021, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Adiwidjaja, Ignatius, 2020, *Sistem Politik Indonesia (Sebuah Dinamika Negara Demokrasi dan Ruang Lingkupnya dalam Bingkai Hubungan Pusat-Daerah di Era Otonomi Daerah (Konsep Teori))*, Zahir Publishing, Sleman.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Mahrus dan Deni Setya Bagus Yuherawan, 2020, *Delik-Delik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al Asqalani, Al Hafizh Ahmad bin Ali Bin Hajar, 733 H-852 H, *Bulugh Al Maram Min Adillah Al Ahkam*, (Terjemahan Izzudin Karimi) Darul Haq, Jakarta.
- Anand, Ghansham, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- An Nawawi, 2015, *Riyadhus Shalihin (Edisi Indonesia)*, (Terjemahan Solihin), Pustaka Al Kautsar, Jakarta.
- Ardiansyah, Irfan dan Cucu Solihah, 2021, *Nominee Arrangement (Dalam Perspektif Kriminalisasi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Notaris dan Asas Nasionalitas)*, Zahir Publishing, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- Aristoteles, 2020, *Etika Nikomakea*, (Terjemahan Roger Crisp, Ratih Dwi Astuti), Basabasi, Yogyakarta.
- Arliman S, Laurensius, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta.
- Army, Eddy, 2020, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arsyad, Jawade Hafidz dan Dian Karisma, 2018, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ayza, Bustamar, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, 2017, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'Lu' Wal Marjan)*, (Terjemahan Muhammad Ahsan Bin Usman), Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Candra, Septa, 2021, *Perumusan Ketentuan Pidana dalam Hukum Pidana Administratif*, Kencana, Jakarta.
- Chazawi, Adami 2014, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang.

- Chazawi, Adami 2018, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Media Nusa Creative, Malang.
- Copleston, Frederick, 1993, *Filsafat Aristoteles*, (Terjemahan Atollah Renanda Yafi), Basabasi, Yogyakarta.
- Damanuri, Aji, 2021, *Iktikad Baik dalam Berkontrak (Upaya Mewujudkan Keadilan Hukum dan Ekonomi dalam Berakad)*, Nasya Expanding Management, Pekalongan.
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Dornbierer, Andrew, 2021, *Illicit Enrichment a Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth*, Basel Institute on Governance, Basel.
- Dornbierer, Andrew 2021, *Lampiran Annex IA Compilation Of Illicit Enrichment Legislation And Other Relevant Legislation*, Basel Institute on Governance, Basel.
- Dornbierer, Andrew, 2021, *Annex II Proving illicit enrichment using financial investigation and Source and Application of Funds analysis*, Basel.
- Efendi, A'an dan Dyah Ochterina Susanti, 2021, *Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Faisal, Ahmad dan Setiadi, 2021, *Akuntansi Perpajakan*, NEM, Pekalongan.
- Fakhrudin, Hendy M., 2008, *Istilah Pasar Modal A-Z*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Firman, Syahdi, 2023, *Aspirasi Penerapan Syari'at Islam di Indonesia (Studi Perdebatan tentang Kembali Kepada Undang-undang Dasar 1945)*, Adanu Abimata, Indramayu.
- Fransiska, Asmin, Arif Rachman Iryawan, Alfiana Qisthi, Miko S. Ginting, totok yulianto, dan Yohan Misero, 2020, *Anomaly Kebijakan Narkotika*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M, 1977, *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall, New Jersey.
- 1987, *The Legal System: A social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Fuady, Munir dan Sylvia Laura L. FUady, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Gadjong, Agussalim Andi, 2019, *Ilmu Negara*, Agussalim Andi Gadjong.
- Ganarsih, Yenti, 2017, *Penegakan Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indoensia*, RajaGafindo Persada, Depok.
- Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hakim, Lukman, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Handoko, Duwi, 2015, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru.

- 2016, *Dekriminalisasi terhadap Delik Delik dalam KUHP*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru.
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hidayat, Bunadi, 2014, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung.
- Humris, M. A. Razmy 2014, *Memahami Motif Dan Mengantisipasi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Bisnis Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ilyas, Amir dan Muh Nursal, 2022, *Kumpulan Asas Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Income and Asset Disclosure: Case Study Illustrations*, The World Bank, Washington DC.
- Irawan, James Julianto, 2014, *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Kencana, Jakarta.
- Ismansyah, 2015, *Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Jahja, Juni Sjafrin 2012, *Say no to korupsi*, Visimedia, Jakarta, 2012.
- Jr Muir, William Ker, 1977, *Police Streetcorner Politicians*, The University of Chicago press, Chicago /London.
- Judissen, Rinsky K. 2004, *Perpajakan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kartayasa, Mansur, 2017, *Korupsi & Pembuktian Terbalik: dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta.
- Kartika, Shanti Dwi dan Noverdi Puja Saputra, 2021, *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
- Kasiyanto, Agus, 2018, *Tindak Pidana Korupsi (Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa)*, Kencana, Jakarta.
- Katsir, Ibnu, 2017, *Kisah Para Nabi (Edisi Indonesia)*, (Terjemahan Saefulloh MS) Qisthi Press, Jakarta.
- Kholik, Abdul, 2020, *Revitalisasi Negara Hukum Pancasila*, Pilar Nusantara, Semarang.
- Klitgaard, Robert, 1988, *Controlling Corruption*, (Terjemahan Hermojo) Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kofel-Kale, Ndiva, 2013, *Combating Economic Crimes: Balancing Competing Rights and Interest in Prosecuting the Crime of Illicit Enrichment*, Routledge, Oxfordshire.
- Kusumastuti, Ely, 2019, *Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan*, Media Nusa Creative, Malang.
- Lubis, Todung Mulya 2009, *Kontroversi Hukuman Mati*, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi, Buku Kompas.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Lutfianingsih, Fifit Fitri, Mega Dewi, Lina Indria, Arhamu Rijal, Ahmad Afandi Maulana, Faizah Maulidah, Alvira Nata Dewanty, Tsania Aziziyah, Jane Catalina, 2021, *Legal Opinion Kumpulan Lengkap LO dengan Topik*

- Terkini (Bidang Hukum Pidana- Perdata -Administrasi), Jakad MediaPublishing, Surabaya.
- Majid, Abdul, Eny Harjati, dan Triya Indra Rahmawan, 2021, *Kebijakan Formulasi Delik dalam Peraturan Daerah*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Mangkepriyanto, Extrix, 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia, Bogor.
- Mangku, Dewa Gede Sudika, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Lakeisha, Klaten.
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Aura, Bandar Lampung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2017, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta.
- Moh. Taufik, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pajak*, Tanah Air Beta, Bantul.
- Muliadi, Ahmad, 2014, *Politik Hukum*, Akademia Pertama, Padang.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Alumni*, Bandung.
- Musahib, Abdul Razak, *et. all*, 2022, *Sosiologi Hukum*, Media Sains Indonesia, Bandung.
- Mustofa, Syahrul dan Ady Supryadi, 2020, *Mengenal Hukum Pajak dan Hukum Acara Pajak di Indonesia*, Guepedia, Mataram.
- Muzila, Lindy, Michelle Morales, Marianne Mathias, dan Tammar Berger, 2012, *On the Take Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption*, Washington: The World Bank.
- M Syarufuddin, 2020, *Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi Perma No 1 Tahun 2020*. Kencana, Jakarta.
- Nor, Asdar, 2023, *Asas-Asas Hukum Kontemporer*, Jejak, Sukabumi.
- Padmaningrum, 2021, *Pengembangan Karier dan Disiplin Kerja APratur Sipil Negara*, Penerbit Samudra Biru, Bantul.
- Palma, Alvon Kurnia, Lais Abid, Sely Martini, Hifdzil Alim, Febri Diansyah 2014, *Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Pandiangan, Liberti, 2008, *Cara menghindari 37 Larangan Perpajakan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- 2010, *Hindari Kesalahan Pajak:Rakyat Senang jika Anda Patuhi 37 Larangan Perpajakan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Prahassacitta, Vidya, 2023, *Kriminalisasi Penyebaranberita Bohong di Indonesia (Batas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Publik*, Nas Media Indonesia, Klaten-Makassar.
- Pramono, Nindyo dan Sularto, 2017, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, Andi, Yogyakarta.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Medpress Digital, Yogyakarta.

- Prasetyo, Teguh, 2019, *Kriminlisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum (Doktrinal dan Non Doktrinal)*, Social Politik Genius (SIGn), Makassar.
- Rahim, Muh. Ibnu Fajar, 2023, *Asas-Asas Hukum Penuntutan (Back to the Principle)*, Guepedia, Bogor.
- Ramelan, 2012, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta.
- Ratnawati, Juli dan Retno Indah Hernawati, 2015, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Deepublish, Yogyakarta.
- Ravena, Dey dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta.
- Renuat, Firdaus, Padrisan Jamba, Anna Andriani Siagian, Yosep Hadi Putra, Darlisma, Dedi Rismanto, Ragil Surya Prakasa, Yenny Fitri Z, Sukmareni, Riki Zulfiko, Lola Yustrisia, 2023, *Pengantar Hukum Pidana*, Gita Lentera, Padang.
- Ridwan, 2021, *Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Menjalin Kerukunan Umat Beragama*, Azka Pustaka, Pasaman Barat.
- Rohman, Moh. Mujibur, Mia Amalia, Wahyudi BR, Ria Anggraeni Utami, AbdRazak Musahib, Abdul Hamid, Fitriyah Ingratubun, Muhamad Romdoni, Ady Purwoto, Kurniawan, Zonita Zirhani Rumalean, Dian Eka Kusuma Wardani, dan Mahrida, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Global Eksekutif Teknologi, Padang.
- Ruba'I, Masruchin, Made Sadhi Astuti, Adami Chazawi, Setiawan NURdayasakti, Bambang Sudiri, Ismail Navianto, Abdul Madjid, Yuliaty, Alfons Zakaria, Faizin Sulistio, 2015, *Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang.
- Sadi, Muhamad, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta. Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Salam, Aprinus, 2014, *Politik dan Budaya Kejahatan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Setiawan, I Ketut Oka, 2015, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shodikin, Miftakhul, 2023, *Subjek Hukum Sungai Bengawan Solo (Urgensi dan Perluasan Subjek Hukum Internasional)*, Jejak Pustaka, Bantul.
- Shofie, Yusuf, 2011, *Tanggung Jawab dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siahaan, Monang, 2019, *Pembuktian Terbalik dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.
- Sibuea, Hotma P., dan Dwi Seno Wijanarko, 2020, *Dinamika Negara Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok.

- Sijabat, Togar Sahat Manaek, 2022, *Masalah Suap sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Sinaga, Dahlan 2021, *Tindak Pidana Pemilu: Arti Penting Pidana Pemilu*, Nusamedia, Bandung.
- Sirait, Mangaranap, 2021, *Hukum Pidana Internasional dan Perkembangannya*, Deepublish, Sleman.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soelendro, Arie, 2002, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Apbn/Apbd*, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta.
- Spaltani, Bitu Gadsia, Chory Prima Sari, dan Delfiyanto Widiyanto, 2022, *Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*, UAD Press, Yogyakarta.
- Sofyan, Andi Muhammad dan M Aris Munandar, 2021, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia dan Aborsi: suatu refleksi, teoritis, dan empiris*, Kencana, Jakarta.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Prenada Medai, Jakarta.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Sugiyono, 2004, *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Sumaryanto, Djoko, 2020, *Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- 2020, *Bunga Rampai Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Sunardi, Didi dan Endra Wijaya, 2011, *"Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka / Terdakwa"* Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta.
- Susilo, Erwin, 2020, *Surat Dakwaan, Keberatan/ Eksepsi, & Bentuk Penyelesaian Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutedi, Adrian 2011, *Hukum Pajak*, Grafika, Jakarta.
- Sutirna, 2021, *Pendidikan Lingkungan Sosial, Budaya dan Teknologi*, Deepublish, Yogyakarta.
- Suyatno, Thomas, Djuhaepah T. Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, Tinon Yunianti Ananda, dan Chalik, 2007, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Syamsir, 2021, *Motivasi dan Motivasi Pelayanan Publik dalam Manajemen SDM Sektor Publik*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Tanya, Bernard L, Yoan N Simanjuntak, dan Markus Y Hage, 2006, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Kita, Surabaya.

- Tenriawaru, Wisnu Murtopo Nur Muhammad, Efan Apturedi, Baniara Mangapul Sinaga, dan Dimas Pranowo, 2022, *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain Vs Restorative Justice)*, Adanu Abimata, Indramayu.
- Titahelu, Ronald Z. 2016, *Penetapan Asas-Asas Hukum Umum dalam Penggunaan Tanah untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat (Suatu Kajian Filsafati dan Teoretik tentang Pengaturan dan Penggunaan Tanah di Indonesia)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Tornado, Anang Shopan, 2018, *Praperadilan (Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indoensia)*, Nusa Media, Bandung.
- Wahyuni, Sri dan Rifki Khoirudin, 2020, *Pengantar Manajemen Aset*, Nas Media Pustaka, Makassar.
- Wijoyo, Kunto, 2003, *Radikalisme Petani*, Gerbang, Yogyakarta.
- Windari, Rusmilawati, 2022, *Kebijakan Formulasi Larangan Hukuman Fisik (Corporal Punishment) pada Anak dalam Lingkup Pengasuhan dan Pendidikan (Kajian Integratif terhadap Penanggulangan Kekerasan pada Anak)*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Whittington, Keith E., R. Daniel Kelemen, dan Gregory A. Caldeira, 2021. *Kepastian Hukum Dan Pengadilan dalam Rejim-Rejim Demokratis (Handbook Hukum dan Politik)*, Nusamedia, Bandung.
- Yamin, Ahmad, Geatriana Dewi, Fadri Sanafiah, dan Jasardi Gunawan, 2022, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Yanto, Andri, 2021, *Mazhab-Mazhab Hukum (Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum)*, Pemimpi SEGAP Pustaka, Jakarta.
- Yulianti, Anna, 2022, *Urgensi Digitalisasi Sistem Pendaftaran Tanah (Guna Memberikan Perlindungan Hukum dan Tercapai Kepastian Hukum dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah)*, Alumni, Bandung.
- Yurizal, 2017, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang.
- Yusni, Muhamad, 2019, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*, Airlangga Universiti Press, Surabaya.
- Zaidan, M. Ali 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Disertasi

- Gashumba, Jeanne Pauline, “Anti-corruption Agencies in Africa: a Comparative Analysis of Rwanda, Sierra Leone and Malawi Faculty of Law, University of the Western Cape, 2010, h. 58.
- Likadja, Jeffry Alexander Christianto, “Revitalisasi Sistem Pertahanan Nasional Sebagai Pilar Kedaulatan Negara”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- Pancasilawati, Abnan, "Rekonstruksi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi" Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Rahmayanti, "Rekonstruksi Pegembalian Civil Forfeiture Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat" Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
- Sabri, Fadillah, "Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Melakukan Malapraktik dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan", Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Taher, Samsul, "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Papua", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Uwimana, Claude, "Legal Regime of Economic Crimes in Rwanda: Case Study of Illicit Enrichment", Faculty of Law of Institut D'Enseignement Superieur de Ruhengri.

C. Jurnal

- Abu-Morad., Mohammad Ahmad, Zainal Amin Ayub, Fauziah Mohammad Noor, "The Law on the Illicit Enrichment Crime and Financial Disclosure in Jordan: Issue of Effectiveness and Enforceability", The Journal of Social Sciences Research, Vol. 2 No. 5, Academic Publishing Group, 2016.
- Abu-Morad., Mohammad Ahmad, Zainal Amin Ayub, Fauziah Mohammad Noor, "Burden of Proof and Presumption of Innocence in the Prosecution of Illicit Enrichment with Reference to the Jordanian Legislation", Journal of Law, Policy and Globalization, Volume 49, Iste, 2016.
- Agustina, Shinta, Siska Elvandari dan Lucky Raspati., "Penyimpangan Asas Non Retroaktif dalam Pengadilan HAM Ad Hoc dari Perspektif HAM", Jurnal Media Hukum, Vol 12 No. 2, Universitas Andalas, 2010.
- Agustina, Shinta, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana", MMH, Jilid 44 No. 4, 2015.
- Aminoto dan Agustina Merdekawati, "Prospek Penempatan Perjanjian Internasional Yang Mengikat Indonesia dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" Mimbar Hukum, Volume 27 Nomor 1, Universitas Gajah Mada, 2015.
- Arianus, Harefa, "Analisis Hukum terhadap Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimum kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Education and Development, Vol. 8 No. 1, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 2020.
- Armedi, Doni, "Surat-Surat Berharga di dalam KUHD dan di Luar KUHD serta Manfaatnya terhadap Pembayaran", Lex Privatum, Vol. VI No. 5, Universitas Sam Ratu langi, 2018, h. 164-166.
- Dahlia, Aditya Amanda Pane, dan Marissa Putriana, "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Tindak Pidana Korupsi (Survei pada LP Klas I Sukamiskin Kota Bandung)", Proceedings of Population and Human Resources Development, Volume 2, Universitas Padjajaran, 2013.

- Bantekas, Ilias, "Corruption as an International Crime and Crime against Humanity", *Journal of Criminal Justice*, No. 4, Oxford University Press, 2006.
- Bikelis, Skirmantas, "Prosecution for Illicit Enrichment: the Lithuanian Perspective", *Journal of Money laundering*, Vol. 20 No. 2, Emerald Insight, 2017.
- Bisyri, Mohammad Hasan, "Fatwa as a tool of Social Engineering: The Study of Fatwa of Tarjih Muhammadiyah", *Jurnal Penelitian*, Vol 17 No. 2 IAIN Pekalongan, 2020.
- Boles, Jeffrey R., "Criminalizing the Problem of Unexplained Wealth: Illicit Enrichment Offenses and Human Rights Violation", *Legislation and Public Policy*, Vol. 17:835, 2014, h. 854.
- Dalilah, Elih dan Vishnu Juwono, "Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh & McConnell", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7 No. 2, Universitas Indonesia, 2021.
- Fauzia, Ana dan Fathul Hamdani, "Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 3 No. 7. Rewang Rencang, 2022.
- Fazry, Muhammad, "Persinggungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Perkara Korupsi" *Journal of Multi Disciplinary Sciences*, Vol 02, No. 1, 2023.
- Febrina Hertika Rani dan Luil Makkun, "Hak-Hak Terdakwa Selama Proses Persidangan di Mahkamah Pidana Internasional Berdasarkan Statuta Roma", *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022.
- Haryanti, Tuti, "Hukum dan Masyarakat", *Tahkim*, Vol, X No. 2, 2014.
- Hidayati, Rika dan Ikhwan Ikhwan, "Perilaku Gaya Hidup Hedonisme di Kalangan Mahasiswa Kurang Mampu Fakultas Ilmu Sosial UNP", *Culture & Society Journal of Anthropological Research*, Vol. 1 No. 1, Universitas Negeri Padang, 2019.
- Hidayatullah, Agus Triono, dan FX Sumarja, "Akuntan Publik: Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi", *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5 No. 1, Universitas Lampung, 2023.
- Intan, Salmah "Kekhalifahan Umar Bin Khattab (13-23 H/634-644 M)", *Jurnal Rihlah*, Vol.5 No 2, 2017.
- Ingnuan, Yuniarti Veronika dan Mohamad Lutfi, "Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)", *Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen*, Vol. 8 No. 2, 2018.
- Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulistyono, "Permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme di daerah serta strategi penanggulangannya", *Demokrasi*, Vol. IX No. 1, 2010.

- Khalid, Afif, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", Al 'Adi, Vol. VI No. 11, 2014.
- Maryam, "Perkembangan Islam di Pakistan", Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam, Vol. 2 No. 2, Universitas Muahmmadiyah Makassar, 2022.
- Michele, Roberto De, "The Role of the Anti Corruption Office in Argentina: Lessons on Corruption and Anti Corruption: Policies and Results", The Journal of Publik Inquiry, 2001.
- Nasution, Bahader Johan, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern" Yustisia, Vol 3 No. 2, 2014.
- Nuriyani dan Rachma Zannati, "Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Piutang terhadap Profitabilitas Perusahaan Sub Sektor Food dan Beverages tahun 2012-2016", Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JMRB), Vol. 2 No. 3, 2017.
- Perdriel, Maud dan Vaissiere, "The Accumulation of Unexplained wealth by Publik Official: Making the Offence of Illicit Enrichment Enforceable", U4 Brief No. 1, CHR Michelsen Institute, 2012.
- Pratama, Mochamad Ramdhan, "Kebijakan Kriminalisasi terhadap Perbuatan Trading in Influence dalam Tindak Pidana Korupsi", Nurani Hukum, Vol 3 No. 1, 2020.
- Popple, James "The Right to Protection from Retroactive Criminal Law", Criminal Law Journal, Vol. 13 No. 4, 1989.
- Prasetyo, Teguh, "Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi" Jurnal Hukum Vol. 16 No. 1 2009.
- Probo Darono Yakti, "The 1994 Hutu and Tutsi Ethnopolitics Conflict in Rwanda: Genocide Revenge Settlement Through the Gacaca Reconciliation System", Jurnal Hubungan Internasional, Vol XV No. 1, 2022.
- Putra, Diky Anandya Kharystya dan Vidya Prahassacitta, "Tinjauan atas Kriminalisasi Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Australia)", Indonesia Criminal Law Review, Volume 1 Nomor 1, Universitas Bina Nusantara, 2021.
- Raharjo, Endiyono dan Rio Saputra, "Illicit Enrichment dalam Penegakan Hukum Pengambilan Ikan secara Tidak Sah (Illegal Fishing) di Wilayah Perairan Indoensia", Legality, Vol 25 No 1, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.
- Rani, Rahmawati Silvia dan Joko Jumadi, "Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia: Studi Perbandingan Negara Peru", Ex Aequo Bono Journal of law, Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 38. Di Peru, Illicit Encrighthment diatur dalam KUHP.
- Rasyid, Arbanur, "Perilaku Konsumtif Dalam Perspektif Agama Islam", Yurisprudnetia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 2, IAIN Padangsidempuan, 2019.

- Roza, Fitra Maulana dan Nurul Jannah, "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Giro IB yang erkonsep Mudharabah pada Bank Sumut Syariah Capem HM. Yamin", *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2 No. 2, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.
- Semendawai, Abdul Haris, "Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 Nomor 3, Universitas Padjajaran, 2016.
- Setiabudhi, Donna Okhtalia, "Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dalam Perspektif Godd Governance", *The Studies of Siocial Science*, Vol. 1 No. 1, Universitas Sam Ratulangi, 2019.
- Setiawan, M. Arif, "Kajian Kritis Teori-Teori Pembeneran Pemidanaan" *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, 1999.
- Sidharta, Bernard Arief, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Simanjuntak, Mangisii, "Mengungkap Tindak Pidana Korupsi dari Pembuktian Terbalik dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara negara (LHKPN)", *Jurnal Ilmiah Dirgantara*, Vol. 7 No. 1, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2016.
- Situngkir, Danel Aditia "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional, *Soumatara Law Review*, Vol. 1 Nomor 1, 2018.
- Strilsiv, Olexandr, Igor Andrushchenko, Vasylynchuk Viktor, "Fundamental Methods of Monitoring the Standard of Living of a Publik Official Who is Suspected of Illicit Encrishment, *Journal of Law and Political Sciences*, Vol 23 nomor 2/B, 2020.
- Sudarto, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2*, 2017.
- Suhariyanto, Budi, "Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektifitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Konstitusi*", Volume 16, Nomor 1, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI. 2019.
- Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi", *Gorontalo Law Review*, Volume 3 Nomor 2, Universitas Gorontalo. 2020.
- Taju, Bryan C. W., "Makna Perubahan Undang-Undang Menurut Pasal 1 Ayat (2) KUHPidana", *Lex Privatum*, Vol 4 No. 6, 2016.
- Ungurean, Ivan, "Benchmarks Concernig the Role of Expert Examination in Criminalistic Investigation of Illicit Enrichment", *Forensic Science*, Vol XXIV No. 3-2023, Moldova State University, 2023.

- Wahyudi, Slamet Tri, 2012, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta.
- Wijayanti, Retno Putri, “Penerapan Syarat Formil dan Materiil dalam Sebuah Surat Dakwaan yang Dinyatakan Obscur Libel serta Persesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Menerima Permohonan Kasasi dalam Putusan MA Nomor 361.K/Pid.Sus/2008”, Jurnal Verstek, Vol 1 No. 1, 2013.
- Zimring, Franklin E. dan David T, Johnson, “On th Comparative Study of Corruption”, British Journal of Criminology Advance Access, Oxford University Press, 2005.

D. Makalah

- Ahiru, Abiodun, “Criminalisation of Illicit Enrichment and the Right to Presumption of Innocence in Nigeria: Finding a Balancing Ground From A Comparative Lens”, 2021.
- Alkotsar, Artidjo “Memperkaya Diri Secara Tidak Sah (Illicit Enrichment) dan Memerpedagangkan Pengaruh (Trading Influence)”, 2019.
- Barcelo III, John J, “Burden of Proof, Prima Facie Cae and Presumption in WTO Dispute Settlement”, 2008.
- Ex-Paraguayan President Gonzales Macchi Jailed on Embezzlement Charges”, Latin America Digital Beat, University of New Mexico, 2007.
- Man-wai, Tony Kwok, “Formulating an Effective Anti-Corruption Strategy: the Experience of Hong Kong ICAC”, Hong Kong University SPACE.
- Suryono, Ahmad, “Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Progresif sebagai Tindakan Pencegahan Korupsi”, Universitas Muhammadiyah Jember.
- Stevanovic, Aleksandar dan Laura Maria Stanila, ”Illicit Enrichment as a Criminal Offense: Possibility of Implementation in the National Criminal Legislations”.
- Weilandt, Max, “The Crime of Illicit Enrichment in Namibia: New Opportunities for Enforcement?”, 2017.

E. Undang-Undang

- United Nation, “United Nation Convention Against Coruption”.
- United Nation, “Universal Declaration of Human Rights”.
- United Nation, “International Covenant on Civil and Political Rights”.
- Council of Europe, “The European Convention on Human Rights”.
- Organization of American States, “The American Convention on Human Rights”,

Organization of African Unity, "The African Charter on Human and Peoples' Rights".

League of Arab States, "The Arab Charter on Human Rights".

Asean, "Deklarasi Ham Asean".

Republik Indonesia, "Undang Undang Dasar Negara R.I. 1945" Lembaran Negara R.I. No. 75 Tahun 1959

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme", 1998.

Republik Indonesia, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana".

Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai" Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Tahun 1969 yang Telah Dicitak Ulang.

Republik Indonesia, "Undang-Undang 03 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Lembaran Negara R.I. Tahun 1971 Nomor 19, dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 2958.

Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap".

Republik Indonesia, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana" Lembaran Negara R.I. Nomor 76. dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Tahun 1981 Nomor 3209.

Republik Indonesia, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal" Lembaran Negara R.I. Tahun 1995 Nomor 64.

Republik Indonesia, "Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 140, dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3874.

Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme" Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3851.

Republik Indonesia, "Undang-Undang 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor 134, dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4150.

Republik Indonesia, "Undang Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Lembaran Negara R.I. Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4250.

- Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen” Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor 134, dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4150.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik” Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 61, dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4846.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 157, dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5076.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan” Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 125, dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5166
- Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 244, dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5587
- Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi” Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 292, dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5601.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” Lembaran Negara R.I. Tahun 2023 Nomor 1, dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6842.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara” Lembaran Negara R.I. Tahun 2023 Nomor 141, dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6897.
- Kongres Kehormatan Bangsa Argentina “Undang Undang Argentina Nomor 25.188 Tahun 1999 Tentang Etika dalam Pelaksanaan Fungsi Publik” 1999.
- Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 003/PUU-IV/2006”.
- Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 40/PUU-X/2012”.
- Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 41/PUU-XIX/2021”.
- Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416.
- Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik”, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149.

Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6454.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, “Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana strategis Komisi Pemberantasan Korupsi 2020-2024”, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1140

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi “Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negera (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah”.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi “Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)”

Rancangan Undang Undang Perampasan Aset
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

F. Website

Abba Gabrillin, “Jadi Perantara Suap Hakim, Pantera PN Jaktim dituntut 6 Tahun Penjara”, <https://nasional.kompas.com> dikunjungi pada tanggal 04 Januari 2024 jam 11.00 WIB.

Angga Yuniar, “Boikot bayar pajak muncul imbas kasus rafael alun, pengamat: Banyak pegawai DJP yang jujur”. [http:// www. Liputan6.com](http://www.Liputan6.com) diakses pada tanggal 2 januari 2024 jam 19.00 WIB.

Anggi Mayasari, “Menkopolkam Imbau ASN Hapus Konotasi Wajar Pada Pungli”, www.antaraneews.com dikunjungi pada tanggal 5 januari 2014 jam 09.00 WIB

Anggie Meidyana, Ironis Produser Film Sang Pengadil Zarof Ricar Malah Jadi Makelar Kasus, <https://www.metrotvnews.com>, dikunjungi pada tanggal 26 Oktober 2024 Jam 19.000 WIB.

Aris, "10 Daftar Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Dunia", www.gramedia.com, dikunjungi pada tanggal 10 Januari 2024 Jam 17.00 WIB.

Aulia Mutiara Hatia Putri, "Negara dengan Umat Muslim Terbanyak Dunia, RI Nomor Berapa?", www.cnbcindonesia.com dikunjungi pada tanggal 05 Januari 2024 jam 20.00 WIB.

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. "*Selama Lima Hari KPK Klarifikasi LHKPN 37 Pejabat di Jatim*", www.kominfo.jatimprov.go.id, dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2025 jam 09.00 WIB.

Dwi Nepia Br Bangun, "Masih Ingat Andhi Pramono yang Istri Dan Anaknyanya Gemar Flexing? Kini jadi Tersangka Kasus Gratifikasi!" www.kilat.com dikunjungi pada tanggal 7 Januari 2024 jam 20.00 WIB.

Faisal Javier, "ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya", <http://www.data.tempo.co>, dikunjungi pada tanggal 11 Januari 2022 Jam 07.00 WIB.

Galuh Palupi, "Setelah Dandy, Giliran Gaya Sosialita Erni Istri Rafael Alun Disorot, Lihat Koleksi Tas Brandednya", www.TribunTrends.com, dikunjungi pada tanggal 7 Januari 2024 jam 13.00 WIB.

Happy Sulistyadi, "Pembuktian Terbalik dan Good Governance", <https://antikorupsi.org>, dikunjungi pada tanggal 10 Januari 2024 jam 17.00 WIB.

Humas MenpanRB, "Calo Ada Karena Izin Dipersulit", www.menpan.go.id, dikunjungi pada tanggal 4 Januari 2024 Jam 21.00 WIB.

JoeJbn, "Penyuluhan Hukum untuk Masyarakat di Desa Kilensari, Kejaksaan Tekankan Pengelolaan Aset Desa", www.kabardesa.co.id dikunjungi pada tanggal 10 Januari 2024 jam 15.00 WIB.

KBBI Online, <http://www.kbbi.web.id>. Dikunjungi pada tanggal 7 Januari 2022 Jam 11.00 WIB.

Kolaborasi Pemerintah, KPK dan 20 LSM Cegah Korupsi, www.kominfo.go.id dikunjungi pada tanggal 7 Januari 2024 jam 19.00 WIB.

KPK "*Pelaporan LHKPN*", www.kpk.go.id dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2025 jam 09.00 WIB

Lida Puspaningtyas, "Misteri Transaksi Rp 300 Triliun di Kemenkeu Akhirnya Terpecahkan". <http://www.ekonomi.republika.co.id> dikunjungi pada tanggal 01 Juni 2023 jam 10.05 WIB.

Merrick, "Proses Pelaporan SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi", www.pajakku.com, dikunjungi pada tanggal 6 Januari 2024 jam 08.00 WIB.

M Rosseno Aji, "KPK sebut 15.649 pejabat negara belum melaporkan LHKPN", <https://nasional.tempo.co> Dikunjungi pada tanggal 2 Maret 2023 jam 06.30 WIB.

Muhammad Sabki, "Ini Kabar Terbaru Rafael Alun dari Balik Jeruji", <http://www.cnbcindonesia.com> dikunjungi pada tanggal 01 Juni 2023 jam 10.00 WIB.

Mad, “Duit Rp 74 M dan Rumah Disita, Gayus Sudah Miskin?”
<http://www.news.detik.com> dikunjungi pada tanggal 17 Januari 2022 jam 10.00 WIB.

“*Population Today*”, <https://populationtoday.com>, dikunjungi pada tanggal 11 Januari 2024 jam 17.00 WIB.

Susi Fatimah, “PNS Kaya Berarti Pintar, Pns Miskin Dianggap Bodoh”,
www.news.okezone.com, dikunjungi pada tanggal 04 Januari 2024 jam 13.00 WIB.

Tahir Saleh, “Simak 4 Fakta Kenapa Hong Kong Begitu Berharga Bagi China”,
www.cnbcindonesia.com, dikunjungi pada tanggal 05 Januari 2024 jam 19.00 WIB.

Tari Oktaviani dan Nibras Nada Nailudar, “Pro Kontra Hukuman Mati Bagi Koruptor”,
<https://nasional.kompas.com>, dikunjungi pada 2 Januari 2024 jam 13.00 WIB

Tommy, “Ini Dia, Tiga Modus Pelanggaran Pajak Terbanyak 2020”,
www.pajakku.com dikunjungi pada tanggal 05 Januari 2024 jam 09.00 WIB.

Transparency International, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022”,
<https://ti.or.id>, dikunjungi pada tanggal 5 Januari 2024 Jam 19.00 WIB.

Tim Tvone, “Yordania Termasuk Negara Islam Paling Aneh di Timur Tengah...”,
www.tvOneNews.com, dikunjungi pada tanggal 07 Januari 2024 jam 10.00 WIB.

“Wakajati Jambi Lantik Pejabat Fungsional Auditor Kejati Jambi”,
<http://Kejati-jambi.kejaksaan.go.id>. Dikunjungi pada 11 Januari 2024 jam 19.00 WIB.

<http://www.data.kemenag.go.id> dikunjungi pada tanggal januari 5 januari 2022 jam 10.00 WIB

www.google.com dikunjungi pada tanggal 01-01-2022 Jam 07.00 WIB

<https://jdih.ppatk.go.id> Diakses 18 Januari 2024 pukul 11.00 WIB.

